

DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA TERHADAP PEMBERDAYAAN NELAYAN DI DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN

Dina Dahliana¹, Kustiawan², Novi Winarti³
dahlianadina4@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This study uses the theoretical approach of Riant Nugroho (2008: 5), namely there are 4 indicators to analyze the empowerment of fishing communities in Teluk Bakau Village. The research method used is descriptive qualitative research method. The results obtained are: In terms of access, the fishing community has not been able to get a fishing area that is quite easy to catch fish in Teluk Bakau Village. In terms of participation, tourism development that occurred in Teluk Bakau Village, towards the empowerment of fishing communities has not been fully included in decision making. However, construction is still ongoing in Teluk Bakau Village. In terms of control, the supervision of the village government in tourism development in Teluk Bakau Village, the village government only held a meeting between the fishing community and the tourism manager and discussed the problems that occurred between the fishing community and the tourism sector. In terms of benefits, the use of resources in Teluk Bakau Village is still not felt by the fishing community even though the fishing community is able to get catches at sea to increase the income of the fishing community in Teluk Bakau Village. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation related to the impact of tourism development on the empowerment of fishermen in Teluk Bakau Village. The negative impact of tourism development on the empowerment of fishing communities is still felt by the fishing communities in Teluk Bakau Village.

Keywords: Impact, development, tourism, fishermen

I. Pendahuluan

Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan bahwa dalam pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah, diselenggarakan berdasarkan prinsip yaitu: a) Pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat; b) Keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat; c) Konservasi; dan d) Partisipasi masyarakat.

Berikut perkembangan pembangunan usaha akomodasi pariwisata yang dibangun di atas lahan pesisir pantai di Desa Teluk Bakau pada Tahun 2019:

Tabel 1. 1 Jumlah Pembangunan Usaha Akomodasi Pariwisata Pada Tahun 2019 di Desa Teluk Bakau

No	Nama Usaha	Tahun Operasional	Total
1	Bintan Agro Beach Resort	2006	250 Unit
2	Kelong Pemancingan Hally	2002	23 Unit
3	Trikora Beach Club	2014	17 Unit
4	Laguna Resort	2006	12 Unit
5	Sahid Raya Bintan	2006	46 Unit
6	Pearl Beach Resort	2016	22 Unit
7	Bintan Spa Villa	2009	25 Unit
8	White Sand	2015	6 Unit

Sumber : Data Desa Teluk Bakau Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 Jumlah Pembangunan Usaha Akomodasi Pariwisata Pada Tahun 2019 di Desa Teluk Bakau, pembangunan usaha akomodasi pariwisata di mulai pada tahun 2002 yaitu Kelong Pemancingan Hally dengan jumlah 23 unit sedangkan pada tahun 2016 yaitu Pearl Beach Resort dengan jumlah 22 unit. Selain itu berdasarkan jumlah pembangunan usaha akomodasi pariwisata yang paling banyak dilakukan di Desa Teluk Bakau yaitu Bintan Agro Beach Resort dengan jumlah 250 unit sedangkan yang paling sedikit yaitu White Sand dengan jumlah 6 unit.

Dalam dunia pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat di defenisikan sebagai proses penguatan masyarakat yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara (Herliata, 2019). Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu atau sekelompok masyarakat melalui penguatan kapasitas (yang berupa kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang dibutuhkan untuk mengubah kualitas individu maupun kelompok tersebut. Kapasitas yang dimaksud adalah panguatan ekonomi dan politik melalui pembentukan komunitas sosial yang lebih besar yang bekerja dengan tujuan dan visi yang sama. Maka pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Mardikanto, 2017).

Tabel 1. 2 Pembinaan dan Pemberdayaan Desa Teluk Bakau Tahun 2019

No	Kegiatan	Bidang
1	Rehab Lapangan Volly Desa	Pembinaan (peningkatan sarana & prasarana)
2	Penyertaan Modal Bumdes	Pembinaan (peningkatan sarana & prasarana)
3	Pegadaan Bengkel Rekayasa	Pemberdayaan (TTG)
4	Pelatihan Sablon	Pemberdayaan (pelatihan kelompok usaha)
5	Pelatihan Bidang Hukum	Pembinaan (pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat)
6	Pegadaan Alat Orgen Tunggal	Pembinaan (grup kesenian & kebudayaan tingkat desa)
7	STQ	Pembinaan (festival kesenian kebudayaan)

8	Jong	Pembinaan (festival kesenian kebudayaan)
9	Bintan Maghrib Mengaji	Pembinaan (festival kesenian kebudayaan)
10	Turnamen Bola Volly	Pembinaan (festival kesenian kebudayaan)
11	Turnamen Bola Kaki	Pembinaan (festival kesenian kebudayaan)
12	KPMD	Pembinaan (lpmd)
13	LPM	Pembinaan (lpmd)
14	KATAR	Pembinaan (lpmd)
15	BPKB	Pembinaan (lpmd)
16	PKK	Pembinaan (pkk)
17	Operasinal TTG	Pemberdayaan (pengadaan ttg untuk pengembangan ekonomi)
18	Penanggulangan Masjid Al-Mukmin	Pembinaan (tanggap bencana)
19	Rehab Teras Mesjid Al-Mukmin	Pembinaan (rehab sapras)
20	Belanja Tak Terduga	Pemberdayaan (penanggulangan bencana)

Sumber : Data Desa Teluk Bakau Tahun 2019

Namun, dari kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan Desa wisata belum berpihak kepada masyarakat Desa Teluk Bakau. Berdasarkan wawancara awal dengan ketua nelayan Bapak Sukur Hariyanto masalah awal pengembangan pariwisata yang dilakukan di Desa Teluk Bakau adalah adanya konflik antara masyarakat nelayan dengan pengembangan jasa pariwisata, konflik yang terjadi salah satunya yaitu sempitnya ruang tangkap untuk masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan melakukan penangkapan ikan pada wilayah pesisir 0-2 mil di jalur penangkapan, akan tetapi akibat adanya pembangunan akomodasi pariwisata di bibir pantai yang mengenai wilayah pesisir jalur penangkapan bagi nelayan menjadi hambatan bagi masyarakat nelayan.

Hal ini di mulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun ini masa pariwisata yang begitu pesat dilakukan karena pihak pariwisata yang menjual jasa bawah air, seperti *snorking*, *diving*, *mincing* dan permainan selam lainnya. Sehingga banyak pembangunan yang dibangun di kawasan laut, dimana tempat masyarakat nelayan pesisir mengalami sedikit kesusahan dalam melakukan penangkapan akibat adanya bangunan pariwisata yang sudah terjadi di desa, tidak hanya dari pembangunan pariwisata, namun aktifitas dari pariwisata juga dapat memberikan dampak kepada masyarakat nelayan.

Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang berada di Desa Teluk Bakau, dilihat dari pembangunan pariwisata yang mengeksploitasikan ahli fungsi lahan pesisir semakin gencar dilakukan oleh pihak pariwisata. Hingga membuat kekhawatiran bagi masyarakat Desa Teluk Bakau dengan keadaan tersebut. Mereka beranggapan untuk kedepannya tidak akan bisa lagi menjalankan rutinitas sebagai nelayan, karena sepanjang daerah pesisir telah dipagari oleh pihak pariwisata.

Berdasarkan uraian masalah yang dipaparkan di latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Bagaimana Dampak Pembangunan Pariwisata terhadap Pemberdayaan Nelayan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif ini (Sugiyono, 2014) sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif ini dipilih agar dapat menggambarkan realitas kondisi Pembangunan Pariwisata pada proses pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bintan.

III. Hasil dan Pembahasan

Desa Teluk Bakau sebagai salah satu desa yang memiliki destinasi pariwisata di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki banyak keunikan wisata yang khas. Keunikan dan wisata yang berada di Desa Teluk Bakau dikembangkan sebagai salah satu destinasi pariwisata yang berbasiskan pada budaya. Harapan ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan pariwisata yang berada di Desa Teluk Bakau kemudian diwujudkan oleh masyarakat melalui penyediaan layanan-layanan pariwisata untuk melengkapai kebutuhan wisatawan yang sedang berkunjung seperti sarana pembangunan akomodasi pariwisata yaitu penginapan yang menyediakan keindahan alam yang bernuansa bahari dan budaya khas melayu. Dari sini masyarakat yang mengelola akomodasi pariwisata akan mendapatkan keuntungan terutama finansial yang cukup besar. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari (Nugroho, 2008) mengemukakan ada empat indikator dalam pemberdayaan antara lain :

A. Akses

Akses merupakan bagian dari pemberdayaan dimana akses dalam pemberdayaan mengharapkan terciptanya jalan keluar untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan. Adapun indikator yang dapat dilihat ada atau tidaknya yaitu :

- a. Mendapatkan wilayah tangkap yang cukup mudah dalam penangkapan ikan di Desa Teluk Bakau akibat bangunan pariwisata belum dirasakan oleh masyarakat nelayan. Pembangunan pariwisata masih membuat masyarakat nelayan kesulitan dalam mendapatkan wilayah tangkap karena pembangunan pariwisata yang terus dilakukan mendekati area penangkapan nelayan sehingga masyarakat nelayan jika melakukan penangkapan ikan harus melewati pariwisata yang berada di laut..
- b. Pembangunan yang akan dilakukan oleh pihak pariwisata hanya mengajak untuk membahas soal hak izin usaha pariwisata di Desa Teluk Bakau. Namun pihak pariwisata tidak menyinggung pembangunan pariwisata terkait jalur pelayaran masyarakat nelayan. Bahwa pembangunan akan mengganggu jalur penangkapan masyarakat nelayan. Sehingga masyarakat nelayan yang berdampak pada pembangunan pariwisata yang hanya mengandalkan profesinya sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup harus menerima kerugian berupa sempitnya ruang tangkap masyarakat nelayan.

Kegiatan pembangunan pariwisata di wilayah pesisir pantai Desa Teluk Bakau yang dilakukan oleh pihak pariwisata tersebut menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat nelayan. Perbedaan pendapat adalah hal yang senantiasa ada dalam kehidupan sosial, baik perbedaan pendapat antara individu maupun kelompok. Pemerintah Desa Teluk Bakau tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat nelayan, sehingga melahirkan perpesi bahwa pembangunan pariwisata memiliki kepentingan pribadi dan

kelompok. Pemerintah desa bersama dengan pihak pariwisata terlebih dahulu memperhatikan keberdayaan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang berada di Desa Teluk Bakau yaitu seperti mensosialisasikan atau membicarakan langsung terkait pembangunan pariwisata terkait berbagai manfaat atau keuntungan dari pembangunan pariwisata baik untuk masyarakat nelayan maupun masyarakat yang bukan sebagai nelayan. Menjelaskan pula bagaimana dampak pembangunan pariwisata ke depannya bagi Desa Teluk Bakau. Serta memperhatikan langsung seperti apa kondisi geografis, sosial-budayanya serta kondisi ekonominya. Karena masyarakat nelayan sangat perlu diberdayakan seperti sosialisasi, pelatihan maupun bimbingan.

B. Partisipasi

Partisipasi sangat diperlukan dalam sebuah pembangunan. Partisipasi adalah bagian dari pemberdayaan dimana masyarakat tersebut ikut serta dalam proses pengambilan keputusan serta masyarakat dapat memberikan ide-ide yang ingin mereka sampaikan. Dilihat dari :

- a. Pembangunan pariwisata yang dilakukan di Desa Teluk Bakau belum mengikutsertakan masyarakat nelayan dalam memberikan proses pengambilan keputusan pada pembangunan pariwisata. Diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada pembangunan pariwisata, karena masyarakat nelayan memiliki hak dan tanggung jawab, disebabkan pembangunan akomodasi pariwisata yang dilakukan berada pada bagian wilayah masyarakat nelayan di Desa Teluk Bakau.
- b. Kondisi sumber daya pesisir dan di laut yang bersifat common property (milik bersama). Ini mengarah kepada yang berada di bawah kontrol pemerintah atau lebih mengarah pada sifat sumber daya yang merupakan public domain, sehingga sifat sumber daya bukanlah tidak ada pemiliknya yang tidak mungkin dapat untuk di kelola. Pembangunan yang masih saja terus terjadi yang dilakukan oleh banyak pihak telah menimbulkan kerusakan pada biota laut seperti remis yang berada di pesisir tepi pantai. Penimbunan pembangunan pariwisata yang membuat kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya yang terus dilakukan tanpa memperhatikan potensi lestari yang ada di Desa Teluk Bakau.

C. Kontrol

Kontrol merupakan suatu pengawasan serta pengendalian agar masyarakat tersebut dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Adapun indikator yang dilihat adalah :

- a. Pemerintah desa bersama dengan KNTI hanya bisa melakukan teguran, lalu menyurati pihak pengelola pariwisata, dan melakukan diskusi terhadap permasalahan yang terjadi. Pada umumnya, kontrol masyarakat atas pembangunan pariwisata diambil alih oleh pihak pariwisata, yang akhirnya membuat masyarakat lokal terutama masyarakat nelayan yang mendapatkan dampak dari pembangunan pariwisata di desa kehilangan kontrol mereka sendiri yang berada di daerah mereka, ini seringkali menjadikan kerugian bagi masyarakat setempat dan menguntungkan pihak pariwisata.

D. Manfaat

Manfaat merupakan hasil pemanfaatan sumberdaya yang dihasilkan dan dirasakan bagi para nelayan. Dilihat dari :

- a. Pembangunan pariwisata di Desa Teluk Bakau belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan dalam terpenuhinya kebutuhan keluarga, dikarenakan akibat sempitnya lahan yang mengakibatkan hasil penangkapan ikan masyarakat nelayan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya pembangunan pariwisata yaitu penimbunan lahan di area laut Desa Teluk Bakau.
- b. Melalui peningkatan perekonomian, pembangunan pariwisata di Desa Teluk Bakau juga masih belum memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan, karena lahan masyarakat nelayan

masih dialih fungsikan untuk pembangunan pariwisata sehingga ruang tangkap masyarakat nelayan yang sempit akibat adanya pembanguana pariwisata. Meskipun pihak pariwisata memberikan manfaat pada lapangan pekerjaan bagi anak-anak masyarakat nelayan, namun pembangunan pariwisata belum memberikan pemanfaatan pada peningkatan perekonomian sehingga dampak pembangunan pariwisata terhadap pemanfaatan sumber daya kepada masyarakat nelayan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan belum meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Desa Teluk Bakau.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dampak negatif pembangunan pariwisata terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan masih dirasakan oleh masyarakat nelayan di Desa Teluk Bakau, dilihat berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Dari segi akses, masyarakat nelayan belum mampu mendapatkan wilayah tangkap yang cukup mudah dalam penangkapan ikan di Desa Teluk Bakau. Adapun faktor yang menjadikan kendala yaitu akibat adanya pembangunan pariwisata yang dilakukan di sekitaran area pesisir pantai dan laut menjadikan ruang sempit penangkapan ikan bagi masyarakat nelayan.
2. Dari segi partisipasi, dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat sangatlah di perlukan, apalagi dalam sebuah pembangunan. Partisipasi yang dimaksud adalah dalam pengambilan keputusan dan ide ataupun pendapat masyarakat. Dilihat dari pembangunan akomodasi pariwisata yang terjadi di Desa Teluk Bakau, dalam pembangunan pariwisata terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan tidak sepenuhnya diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Namun pembangunan masih terus dilakukan di Desa Teluk Bakau.
3. Dari segi kontrol, pengawasan pemerintah desa dalam pembangunan pariwisata di Desa Teluk Bakau yaitu pemerintah desa melakukan kontrol pada pembangunan pariwisata, jika terus dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah desa maka akan ditegur dan jika bangunan pariwisata memberikan dampak kepada masyarakat nelayan, maka pemerintah desa hanya melakukan pertemuan antara masyarakat nelayan dengan pihak pengelola pariwisata dan membahas permasalahan yang terjadi.
4. Dari segi manfaat, pemanfaatan sumber daya di Desa Teluk Bakau belum di rasakan oleh masyarakat nelayan karena terkendala pada wilayah tangkap masyarakat nelayan sehingga masyarakat nelayan belum mampu mendapatkan hasil tangkap di laut yang maksimal.

V. Daftar Pustaka

- Heliarta. 2019. Pembangunan Nasional. Semarang:Alprin
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebati. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan Proses. Jakarta:Elex Media Komputindo.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata
Unggulan Daerah Kabupaten Bintan
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta